



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114) agar ditambahkan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu;
4. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu;
5. Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat KDH adalah Bupati Mahakam Ulu;

6. Wakil Kepala Daerah selanjutnya disingkat WKDH adalah Wakil Bupati Mahakam Ulu;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
10. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
11. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
12. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
13. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
14. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berupa pembagian laba/deviden;
15. Lain-Lain PAD yang sah adalah seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari APBN atau APBD antar daerah yang memiliki tujuan untuk pemerataan pendapatan di daerah serta menutup celah fiskal daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah;
17. Lain-Lain pendapatan daerah yang sah adalah penerimaan lain yang diterima oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak termasuk dalam klasifikasi PAD dan Pendapatan Transfer;
18. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
19. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
20. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi;
21. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti

- penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah;
22. Belanja transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
 23. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Total APBD Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Mahakam Ulu sebesar Rp 2.450.000.000.000,00 (dua triliun empat ratus lima puluh miliar rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp 1.927.326.126.323,00 (satu triliun sembilan ratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh enam juta seratus dua puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

- (1) PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 16.889.273.323,00 (enam belas miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.622.500.000,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.936.550.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 278.732.980,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah); dan

- (5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 11.051.490.343,00 (sebelas miliar lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.622.500.000,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak hotel Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - b. Pajak restoran Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
 - c. Pajak reklame Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - d. Pajak penerangan jalan Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - e. Pajak sarang burung walet Rp 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - f. Pajak mineral bukan logam dan batuan Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - g. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); dan
 - h. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.936.550.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi jasa umum Rp 1.894.000.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta rupiah); dan
 - b. Retribusi jasa usaha Rp 42.550.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp 278.732.980,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), yaitu bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD Rp 278.732.980,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Anggaran lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp 11.051.490.343,00 (sebelas miliar lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan Rp 1.191.054.200,00 (satu miliar seratus sembilan puluh satu juta lima puluh empat ribu dua ratus rupiah); dan
 - b. Hasil kerja sama daerah Rp 510.285.000,00 (lima ratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- c. Jasa giro Rp 3.123.387.311,00 (tiga miliar seratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus sebelas rupiah);
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah Rp 1.452.577.795,00 (satu miliar empat ratus lima puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima rupiah);
- e. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain Rp 236.482.102,00 (dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu seratus dua rupiah);
- f. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Rp 4.248.514.695,00 (empat miliar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah);
- g. Pendapatan denda pajak daerah Rp 916.180,00 (sembilan ratus enam belas ribu seratus delapan puluh rupiah); dan
- h. Pendapatan dari pengembalian Rp 288.273.060,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam puluh rupiah).

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.907.114.193.000,00 (satu triliun sembilan ratus tujuh miliar seratus empat belas juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.720.966.891.000,00 (satu triliun tujuh ratus dua puluh miliar Sembilan ratus enam puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana perimbangan Rp 1.669.280.863.000,00 (satu triliun enam ratus enam puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah); dan
 - b. Dana Desa Rp. 51.686.028.000,00 (lima puluh satu miliar enam ratus delapan puluh enam juta dua puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 186.147.302.000,00 (seratus delapan puluh enam miliar seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan bagi hasil Rp 157.067.608.000,00 (seratus lima puluh tujuh miliar enam puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu rupiah); dan
 - b. Bantuan keuangan Rp. 29.079.694.000,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Pasal 7

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp 3.322.660.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), yang

berupa lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 2.440.000.000.000,00 (dua triliun empat ratus empat puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.279.794.124.861,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja subsidi;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 281.939.164.565,00 (dua ratus delapan puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus enam puluh lima rupiah);
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 927.572.719.598,00 (sembilan ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 63.382.240.698,00 (enam puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah); dan
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 5.650.000.000,00 (lima miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 281.939.164.565,00 (dua Ratus delapan puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus enam puluh lima rupiah); terdiri atas:

- a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH; dan
 - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp 120.649.209.731,00 (seratus dua puluh miliar enam ratus empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah);
 - (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp 132.132.904,362,00 (seratus tiga puluh dua miliar seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus empat ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah);
 - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp 12.957.519.600,00 (dua belas miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah);
 - (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp 15.275.800.872,00 (lima belas miliar dua ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah);
 - (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e direncanakan sebesar Rp 182.770.000,00 (seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah); dan
 - (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f direncanakan sebesar Rp 740.960.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 927.572.719.598,00 (sembilan ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) terdiri atas:
 - a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas; dan
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp 312.199.053.767,00 (tiga ratus dua belas miliar seratus sembilan puluh sembilan juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah);

- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp 318.602.675.721,00 (tiga ratus delapan belas miliar enam ratus dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah);
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp 14.547.839.580,00 (empat belas miliar lima ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp 242.276.138.180,00 (dua ratus empat puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh rupiah); dan
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e direncanakan sebesar Rp 39.947.012.350,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Pasal 12

Anggaran subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), terdiri atas belanja subsidi kepada badan usaha milik swasta.

Pasal 13

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 63.382.240.698,00 (enam puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - b. Belanja hibah dana BOS; dan
 - c. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 47.922.476.850,00 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- (3) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 13.668.520.000,00 (tiga belas miliar enam ratus enam puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah); dan

- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 358.013.808,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta tiga belas ribu delapan ratus delapan rupiah).

Pasal 14

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 5.650.000.000,00 (lima miliar enam ratus lima puluh juta rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja bantuan sosial kepada individu; dan
 - b. Belanja bantuan sosial kepada keluarga.
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah); dan
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.020.408.544.607,00 (satu triliun dua puluh miliar empat ratus delapan juta lima ratus empat puluh empat enam ratus tujuh rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja Modal aset lainnya;
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.476.157.612,00 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus dua belas rupiah);
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 104.655.859.314,00 (seratus empat miliar enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat belas rupiah);
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 160.193.309.408,00 (seratus enam puluh miliar seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus sembilan ribu empat ratus delapan rupiah);
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 700.375.134.273,00 (tujuh ratus miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta seratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);

- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 416.263.600,00 (empat ratus enam belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah); dan
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 51.291.820.400,00 (lima puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah).

Pasal 16

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp 23.767.608.132,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu seratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 17

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp. 116.029.722.400,00 (seratus enam belas milyar dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan keuangan.

Pasal 18

- (1) Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 512.673.873.677,00 (lima ratus dua belas miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Penerimaan pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran pembiayaan.
- (2) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp 522.673.873.677,00 (lima ratus dua puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah); dan
- (3) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 19

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari;

- a. Lampiran I : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan

- pembiayaan;
- b. Lampiran II : Rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. Lampiran III : Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah;
 - d. Lampiran IV : Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial;
 - e. Lampiran V : Daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
 - f. Lampiran VI : Daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil;
 - g. Lampiran VII : Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - h. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan DBH-mintak dan gas bumi menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - i. Lampiran IX : Rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
 - j. Lampiran X : Sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten pada daerah perbatasan dalam peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara.

Pasal 20

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
Pada tanggal 29 Desember 2023
BUPATIMAHAKAM ULU,




BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH,




STEPHANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2023 NOMOR 32



KABUPATEN MAHAKAM ULU
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	16.889.273.323,00
4.1.01	Pajak Daerah	3.622.500.000,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	25.000.000,00
4.1.01.06.07	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	20.000.000,00
4.1.01.06.07.0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	20.000.000,00
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	5.000.000,00
4.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	5.000.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	800.000.000,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	50.000.000,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	50.000.000,00
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	750.000.000,00
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	750.000.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	50.000.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	50.000.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	50.000.000,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	400.000.000,00
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	350.000.000,00
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	350.000.000,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	50.000.000,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	50.000.000,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	22.500.000,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	22.500.000,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	22.500.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	175.000.000,00
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	173.000.000,00
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	173.000.000,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.000.000,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	150.000.000,00
4.1.01.15.01	PBBP2	150.000.000,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	150.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.000.000.000,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	2.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	2.000.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	1.936.550.000,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	1.894.000.000,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.858.000.000,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	500.000.000,00
4.1.02.01.01.0003	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu	58.000.000,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	1.300.000.000,00
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	36.000.000,00
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	36.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	42.550.000,00
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	42.550.000,00
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	42.550.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	278.732.980,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	278.732.980,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	278.732.980,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	278.732.980,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	11.051.490.343,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.191.054.200,00
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	1.191.054.200,00
4.1.04.01.02.0055	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.191.054.200,00
4.1.04.04	Hasil Kerja Sama Daerah	510.285.000,00
4.1.04.04.01	Hasil Kerja Sama Daerah	510.285.000,00
4.1.04.04.01.0001	Hasil Kerja Sama Daerah	510.285.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	3.123.387.311,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.123.387.311,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.123.387.311,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.452.577.795,00
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	1.452.577.795,00
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	1.452.577.795,00
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	236.482.102,00
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	236.482.102,00
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	236.482.102,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	4.248.514.695,00
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	4.248.514.695,00
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	4.248.514.695,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	916.180,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	916.180,00
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	916.180,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	288.273.060,00
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	67.645.000,00
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	67.645.000,00
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	220.628.060,00
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	220.569.025,00
4.1.04.15.08.0019	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	14.759,00
4.1.04.15.08.0021	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN-Iuran Jaminan Kematian PNS	44.276,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.907.114.193.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.720.966.891.000,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.669.280.863.000,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	1.098.962.235.000,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	25.208.454.000,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	15.108.820.000,00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	71.046.976.000,00
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	969.098.377.000,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	7.715.893.000,00
4.2.01.01.01.0011	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	9.616.529.000,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.167.186.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	474.866.278.000,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	324.626.711.000,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	8.222.247.000,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	45.608.508.000,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	6.426.893.000,00
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	89.981.919.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	69.006.517.000,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	2.141.511.000,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	3.425.747.000,00
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	26.386.000,00
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	617.485.000,00
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	12.989.893.000,00
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	13.351.921.000,00
4.2.01.01.03.0047	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi	6.654.907.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	18.968.667.000,00
4.2.01.01.03.0063	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan	10.830.000.000,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	26.445.833.000,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	4.496.771.000,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	567.000.000,00
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	1.274.134.000,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	571.245.000,00
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	1.725.310.000,00
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	520.000.000,00
4.2.01.01.04.0026	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	10.079.980.000,00
4.2.01.01.04.0027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	462.500.000,00
4.2.01.01.04.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	1.148.560.000,00
4.2.01.01.04.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	45.000.000,00
4.2.01.01.04.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	10.250.000,00
4.2.01.01.04.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	2.304.514.000,00
4.2.01.01.04.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	250.401.000,00
4.2.01.01.04.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	2.990.168.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	51.686.028.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	51.686.028.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	51.686.028.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	186.147.302.000,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	157.067.608.000,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	157.067.608.000,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	18.046.950.000,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	18.000.000.000,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	112.596.510.000,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	300.000.000,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	8.124.148.000,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	29.079.694.000,00
4.2.02.02.01	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	25.329.694.000,00
4.2.02.02.01.0001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	25.329.694.000,00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	3.750.000.000,00
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	3.750.000.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.322.660.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	3.322.660.000,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	3.322.660.000,00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	3.322.660.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	3.322.660.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.927.326.126.323,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.279.794.124.861,00
5.1.01	Belanja Pegawai	281.939.164.565,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	120.649.209.731,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	76.160.331.654,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	58.483.544.270,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	17.676.787.384,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	7.654.554.222,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5.811.406.524,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1.843.147.698,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	12.339.580.787,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	12.176.224.223,00
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	163.356.564,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	2.994.166.790,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	2.968.736.790,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	25.430.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.247.865.420,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.375.344.090,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	872.521.330,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	5.387.571.317,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	4.100.618.717,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.286.952.600,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.007.585.345,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.000.081.989,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	7.503.356,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	200.255.954,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	196.910.677,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.345.277,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	10.580.328.386,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	10.578.830.330,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.498.056,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	661.498.056,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	660.000.000,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1.498.056,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	415.471.800,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	415.471.800,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	132.132.904.362,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	130.880.048.004,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	112.738.918.988,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	18.141.129.016,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.139.560.526,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.139.560.526,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	113.295.832,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	113.295.832,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	12.957.519.600,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	12.957.519.600,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12.859.719.600,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	88.800.000,00
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	9.000.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	15.275.000.872,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	551.793.900,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	551.793.900,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	78.321.600,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	78.321.600,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	81.110.400,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	81.110.400,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	45.129.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	45.129.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	654.370.500,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	654.370.500,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	71.765.100,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	71.765.100,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	16.515.600,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	16.515.600,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.528.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.528.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	882.000.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	882.000.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	170.940.000,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	170.940.000,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	4.763.099.772,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	57.600.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	928.368,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	2.785.104,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	4.701.786.300,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.271.580.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.271.580.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	161.175.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	161.175.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	182.770.000,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	11.200.000,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	11.200.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	11.620.000,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	11.620.000,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	7.000.000,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	7.000.000,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	70.000,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	70.000,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	740.960.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	540.960.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	540.960.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	200.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	200.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	927.572.719.598,00
5.1.02.01	Belanja Barang	312.199.053.767,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	311.754.648.267,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	3.436.290.127,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	898.387.700,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	23.446.728.556,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.078.209.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	343.831.480,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	826.010.200,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	36.509.625,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	705.928.800,00
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	1.366.364.200,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	34.660.400,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	37.676.000,00
5.1.02.01.01.0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	4.819.000,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	30.126.600,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	396.479.592,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14.037.673.077,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.144.851.485,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	48.023.392,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.441.257.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	861.116.395,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.242.431.938,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	658.729.845,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.240.221.600,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	123.915.200,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	2.163.473.686,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	751.324.465,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.170.437.142,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	5.146.756.574,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	213.135.502.850,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	887.350.800,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.449.590.038,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	1.920.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.227.038.300,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.333.586.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	489.371.200,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	495.000.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	622.480.000,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	375.000.000,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	455.000.000,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	72.231.800,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	200.208.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	416.536.800,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	316.542.800,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	81.453.500,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	6.815.600,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	40.000.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	423.200.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	105.031.500,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	354.000.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	676.476.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	444.405.500,00
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	444.405.500,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	318.602.675.721,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	253.385.337.671,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.217.940.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	12.700.779.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	445.200.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	255.737.800,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	86.800.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	145.400.000,00
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	85.605.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	110.900.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	3.124.310.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	26.435.538.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	22.402.880.256,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	71.624.900,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	145.350.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	108.111.128.800,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	468.000.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	12.282.733.600,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	8.990.372.500,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	6.494.667.600,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	2.741.112.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	338.976.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	40.800.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	284.983.683,00
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	90.000.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	3.673.200.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	30.000.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	37.500.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	216.445.100,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	30.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	6.363.680.500,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	105.600.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	589.030.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	2.881.074.532,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	259.200.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	21.240.498.400,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	856.000.000,00
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	5.000.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	581.340.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	645.930.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	800.000.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	15.768.271.600,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	795.600.000,00
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	260.000.000,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	8.945.294.400,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.000.000.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	767.377.200,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	492.311.000,00
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	427.311.000,00
5.1.02.02.03.0024	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Air	15.000.000,00
5.1.02.02.03.0035	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	50.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	18.591.842.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	14.153.032.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	392.000.000,00
5.1.02.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	60.000.000,00
5.1.02.02.04.0044	Belanja Sewa Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	47.250.000,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	1.915.000.000,00
5.1.02.02.04.0050	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	360.000.000,00
5.1.02.02.04.0057	Belanja Sewa Kapal Terbang	1.000.000.000,00
5.1.02.02.04.0096	Belanja Sewa Alat Penguji Kendaraan Bermotor	3.600.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	294.000.000,00
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	21.000.000,00
5.1.02.02.04.0404	Belanja Sewa Komputer Jaringan	306.000.000,00
5.1.02.02.04.0407	Belanja Sewa Peralatan Mainframe	39.960.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	6.886.184.550,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	6.067.484.550,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	686.500.000,00
5.1.02.02.05.0010	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2.400.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.05.0033	Belanja Sewa Bangunan Parkir	62.000.000,00
5.1.02.02.05.0042	Belanja Sewa Asrama	67.800.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	237.400.000,00
5.1.02.02.07.0030	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	71.500.000,00
5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	165.900.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	350.000.000,00
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	350.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	8.535.444.400,00
5.1.02.02.09.0001	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	368.000.000,00
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	49.694.700,00
5.1.02.02.09.0007	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	2.893.851.500,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	685.888.400,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	550.000.000,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	111.000.000,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	2.001.009.800,00
5.1.02.02.09.0016	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Industri Pariwisata	1.500.000.000,00
5.1.02.02.09.0018	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Kelembagaan Kepariwisata	376.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	12.625.605.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	521.480.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	11.048.500.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	1.055.625.000,00
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	1.400.000.000,00
5.1.02.02.14.0001	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	1.400.000.000,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	330.279.500,00
5.1.02.02.15.0002	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	1.799.000,00
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	328.480.500,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	14.547.839.580,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.505.534.080,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.864.366.160,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	247.996.320,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	22.266.000,00
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	879.225.600,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	908.409.800,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	454.736.700,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.02.0134	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	58.240.000,00
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	150.000.000,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	59.995.500,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	566.772.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	293.526.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.379.285.700,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	4.334.035.800,00
5.1.02.03.03.0018	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	360.000.000,00
5.1.02.03.03.0057	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi	685.249.900,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	279.559.000,00
5.1.02.03.04.0071	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	250.099.000,00
5.1.02.03.04.0079	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	29.460.000,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	383.460.800,00
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	383.460.800,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	242.276.138.180,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	241.666.036.380,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	236.929.239.380,00
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	34.080.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.062.851.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	639.866.000,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	610.101.800,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	610.101.800,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	39.947.012.350,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	25.668.790.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	413.190.000,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	25.055.600.000,00
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	200.000.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	14.278.222.350,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	14.278.222.350,00
5.1.04	Belanja Subsidi	1.250.000.000,00
5.1.04.03	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	1.250.000.000,00
5.1.04.03.01	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	1.250.000.000,00
5.1.04.03.01.0001	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	1.250.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	63.382.240.698,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	47.922.476.850,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	34.355.676.850,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	34.355.676.850,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	13.566.800.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	13.566.800.000,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	13.668.520.000,00
5.1.05.06.01	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	12.838.900.000,00
5.1.05.06.01.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	12.838.900.000,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	829.620.000,00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	829.620.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	358.013.808,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	358.013.808,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	358.013.808,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	1.433.230.040,00
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	1.433.230.040,00
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	1.433.230.040,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.650.000.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	2.300.000.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	2.300.000.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	2.300.000.000,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	3.300.000.000,00
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	3.300.000.000,00
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	3.300.000.000,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	50.000.000,00
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	50.000.000,00
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	50.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	1.020.408.544.607,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.476.157.612,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	3.476.157.612,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	3.476.157.612,00
5.2.01.01.01.0002	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	3.476.157.612,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	104.655.859.314,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	1.925.502.317,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	1.925.502.317,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	1.867.992.317,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.01.03.0013	Belanja Modal Peralatan Selam	57.510.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	27.760.905.418,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	19.623.266.318,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.251.325.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2.104.640.000,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	79.407.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	14.187.894.318,00
5.2.02.02.04	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	8.137.639.100,00
5.2.02.02.04.0003	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	8.137.639.100,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	12.865.500,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	12.865.500,00
5.2.02.03.03.0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	12.865.500,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	997.488.200,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	997.488.200,00
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	2.285.800,00
5.2.02.04.01.0003	Belanja Modal Alat Panen	936.238.000,00
5.2.02.04.01.0006	Belanja Modal Alat Processing	58.964.400,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	36.908.592.416,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	2.064.942.948,00
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	226.516.800,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	904.975.396,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	933.450.752,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	34.685.557.868,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	29.453.126.970,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	39.642.244,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	739.911.096,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	30.264.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.088.749.705,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	333.863.853,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	158.091.600,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	158.091.600,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	7.068.195.569,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	6.423.993.117,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	2.648.505.328,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	2.983.471.900,00
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	792.015.889,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	133.590.452,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	133.590.452,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	510.612.000,00
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	510.612.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	14.278.387.032,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	12.473.905.132,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	11.720.326.132,00
5.2.02.07.01.0003	Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana	44.850.000,00
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	658.174.200,00
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	24.466.800,00
5.2.02.07.01.0008	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	20.388.000,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	5.700.000,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	1.804.481.900,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.804.481.900,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	2.569.304.800,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	507.429.200,00
5.2.02.08.01.0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	33.110.400,00
5.2.02.08.01.0008	Belanja Modal Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	6.310.000,00
5.2.02.08.01.0010	Belanja Modal Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	257.500.000,00
5.2.02.08.01.0016	Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi	87.600.000,00
5.2.02.08.01.0041	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	14.908.800,00
5.2.02.08.01.0064	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	108.000.000,00
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	1.404.674.500,00
5.2.02.08.04.0002	Belanja Modal Modular Counting and Scientific Electronic	4.674.500,00
5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply	1.400.000.000,00
5.2.02.08.05	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	465.949.000,00
5.2.02.08.05.0002	Belanja Modal Alat Kesehatan Kerja	429.749.000,00
5.2.02.08.05.0006	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya	36.200.000,00
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	191.252.100,00
5.2.02.08.07.0002	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Udara	191.252.100,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	12.700.777.234,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	10.227.830.126,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	9.626.006.826,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	601.823.300,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.472.947.108,00
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	21.245.300,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.762.613.995,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	383.173.013,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	305.914.800,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	125.147.428,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	111.834.088,00
5.2.02.15.02.0001	Belanja Modal Baju Pengaman	56.644.000,00
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	55.190.088,00
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	13.313.340,00
5.2.02.15.03.0001	Belanja Modal Alat Penolong	13.313.340,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	210.000.000,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	210.000.000,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	210.000.000,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	98.693.400,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	98.693.400,00
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	98.693.400,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	160.193.309.408,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	157.141.452.508,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	151.258.433.908,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	113.069.493.158,00
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	3.213.313.700,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	1.019.894.300,00
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	962.060.500,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	12.782.425.250,00
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	199.805.900,00
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	52.051.200,00
5.2.03.01.01.0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	489.000.000,00
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	18.490.524.000,00
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	979.865.900,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	5.883.018.600,00
5.2.03.01.02.0004	Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	5.258.018.600,00
5.2.03.01.02.0012	Belanja Modal Rumah Tidak Bersusun	625.000.000,00
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	48.000.000,00
5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	48.000.000,00
5.2.03.02.01.0004	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	48.000.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	3.003.856.900,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	3.003.856.900,00
5.2.03.04.01.0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	722.068.700,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	2.281.788.200,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	700.375.134.273,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	566.299.351.412,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	546.157.240.447,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	546.157.240.447,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	20.142.110.965,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	19.942.110.965,00
5.2.04.01.02.0011	Belanja Modal Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal	200.000.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	128.348.194.021,00
5.2.04.02.02	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	732.203.200,00
5.2.04.02.02.0004	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	732.203.200,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	45.538.937.185,00
5.2.04.02.04.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai	45.125.937.185,00
5.2.04.02.04.0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	413.000.000,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	51.787.533.636,00
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	51.787.533.636,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	30.289.520.000,00
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	30.289.520.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	3.432.389.000,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	2.527.739.000,00
5.2.04.03.01.0002	Belanja Modal Instalasi Air Sumber/Mata Air	2.527.739.000,00
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	904.650.000,00
5.2.04.03.03.0004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	904.650.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	2.295.199.840,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	2.239.651.440,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	2.239.651.440,00
5.2.04.04.04	Belanja Modal Jaringan Gas	55.548.400,00
5.2.04.04.04.0002	Belanja Modal Jaringan Pipa Distribusi	55.548.400,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	416.263.600,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	114.985.000,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	114.985.000,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	37.585.000,00
5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	77.400.000,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	102.000.000,00
5.2.05.02.03	Belanja Modal Tanda Penghargaan	102.000.000,00
5.2.05.02.03.0001	Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Olahraga	102.000.000,00
5.2.05.05	Belanja Modal Tanaman	199.278.600,00
5.2.05.05.01	Belanja Modal Tanaman	199.278.600,00
5.2.05.05.01.0001	Belanja Modal Tanaman	199.278.600,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	51.291.820.400,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	51.291.820.400,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	51.291.820.400,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	2.585.912.900,00
5.2.06.01.01.0006	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian	48.705.907.500,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	23.767.608.132,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	23.767.608.132,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	23.767.608.132,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	23.767.608.132,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	23.767.608.132,00
5.4	BELANJA TRANSFER	116.029.722.400,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	116.029.722.400,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	116.029.722.400,00
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	3.750.000.000,00
5.4.02.05.01.0002	Belanja Bantuan Keuangan Umum Provinsi kepada Desa	3.750.000.000,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	112.279.722.400,00
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	112.279.722.400,00
	Jumlah Belanja	2.440.000.000.000,00
	Total Surplus/(Defisit)	-512.673.873.677,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	522.673.873.677,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	522.673.873.677,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	522.673.873.677,00
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	522.673.873.677,00
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	522.673.873.677,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	10.000.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	10.000.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	10.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	512.673.873.677,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Mahakam Ulu, 29 Desember 2023
 Bupati

BONIFASIUS BELAWAN GEH